



POLITEKNIK POS INDONESIA
JURNAL AKUNTANSI

TH XII / 02 / Oktober / 2019

ISSN 1979 - 8334

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya)

Diana Maryana, Fitri Lestari Sagala

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kualitas Laporan Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kp Kuningan 45500

Surya Ramadhan Noor, Muhammad Deri Kamaludin

Analisis Biaya Transportasi Dalam Distribusi Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung)

Christine Riani Elisabeth, Nurhayati

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Riani Tanjung, Nindhy Putri Pratama

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018

Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal

Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT XYZ

Khairaningrum Mulyanti, Molyany Gafynia Dongoran

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi

Ade Pipit Fatmavati, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi

Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap Return On Equity Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Periode 2010-2016

Jaka Maulana, Deden Egiani

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Bjb Syariah 2012-2016

Marismiati, Dwi Putra Mahardika

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Pada Bagian Manajemen Persediaan (Warehouse) PT Bio Farma (Persero)

Muhammad Rizal Satria, Najamudin Perbowo

Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap Untuk Mencegah Kehilangan Aset Tetap Di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Nur Aziz Sugiharto, Christine Riani Elisabeth

Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018

Tia Setiani, Rika Nurul Madila



Jurnal Akuntansi	Tahun XII	Nomor 02	Bandung, Oktober 2019	ISSN 1979-8334
------------------	-----------	----------	-----------------------	----------------

JURNAL AKUNTANSI

TH XII / 02 / Oktober / 2019

ISSN : 1979-8334

Setiap tahun terbit dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Berisi hasil penelitian dan kajian analisis di bidang Akuntansi.

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI :

Pelindung

Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

Penanggung Jawab

Y. Casmadi.,SE., MM.

Rima Sundari, SE., M.Ak., Ak.

Anggota

Surya Ramadhan Noor, SE, M.M

Toto Suwarsa, SE,Ak,M.M

Indra Firmansyah, SE, Ak, MM

Dewi Selviani Y, SS. M.Pd.

Rukmi Juwita, SE., M.Si., Ak., CA.

Khairaningrum Mulyanti, S.Pd., M.Pd.

Ade Pipit Fatmawati, SE, M.Pd

M. Rizal Satria, SE, M.Ak, Ak

Marismiati, SE, M.Si

Jaka Maulana, SE. M.Ak, CA, CPSAK

Diana Maryana, SE, M.Si

Riani Tanjung, SE, M.Si, Ak. CA

Christine Riani Elisabeth, SE, M.M

Tia Setiana , S.Pd M.M

ALAMAT PENYUNTING DAN REDAKSI :

Jurusan Akuntansi, Gedung Pendidikan,

Politeknik Pos Indonesia

Jl. Sariasih No 54 Bandung 40151 Telp. 022-2009570, Fax 022-20009568,

E-mail : poltekpos@jurusanakuntansi.com

Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No. 006/BAN-PT/Ak.V/Dpl-III/VI/2005

KATA PENGANTAR

Jurnal Akuntansi diterbitkan setiap enam bulan sekali oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu bagi baik para akademisi, mahasiswa, praktisi dan pihak lainnya yang isinya berupa kajian ilmu dan hasil riset di bidang akuntansi.

Penerbitan saat ini terdiri dari 6 (enam) topik, meliputi :

Akuntansi Keuangan
Akuntansi Biaya
Perpajakan
Auditing
Manajemen Keuangan
Sistem Akuntansi

Mudah-mudahan semua artikel yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca, sehingga menambah semangat untuk terus berinovasi melahirkan karya tulis yang bermanfaat. Amin

Bandung, Oktober 2019

Redaksi

JURNAL AKUNTANSI
ISSN: 19798334
TH XII / 02 / Oktober / 2019

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya) <i>Diana Maryana, Fitri Lestari Sagala</i>	1
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kualitas Laporan Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kp Kuningan 45500 <i>Surya Ramadhan Noor, Muhammad Deri Kamaludin</i>	11
Analisis Biaya Transportasi Dalam Distribusi Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung) <i>Christine Riani Elisabeth, Nurhayati</i>	21
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara <i>Riani Tanjung, Nindhya Putri Pratama</i>	29
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018 <i>Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal</i>	40
Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT XYZ <i>Khairaningrum Mulyanti, Molyany Gafynia Dongoran</i>	51
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi <i>Ade Pipit Fatmawati, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi</i>	60
Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap Return On Equity Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Periode 2010-2016 <i>Jaka Maulana, Deden Egiani</i>	68
Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Bjb Syariah 2012-2016 <i>Marismiati, Dwi Putra Mahardika</i>	78

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Pada Bagian Manajemen Persediaan (<i>Warehouse</i>) PT Bio Farma (Persero)	87
<i>Muhammad Rizal Satria, Najamudin Prabowo</i>	
Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap Untuk Mencegah Kehilangan Aset Tetap Di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia	94
<i>Nur Aziz Sugiharto, Christine Riani Elisabeth</i>	
Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018	103
<i>Tia Setiani, Rika Nurul Madila</i>	

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA CIMAHI

Oleh : Ade Pipit Fatmawasti, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi

e-mail: oktavianicynthya@gmail.com

Abstrak

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan merupakan indikator penilaian pencapaian suatu tujuan sebuah instansi. Kinerja Keuangan Pemerintah dapat dilihat menggunakan perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan, pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah dan pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dokumentasi. Hasil uji hipotesis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7.342 > 2.002$). Artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sedangkan hasil hipotesis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($17.309 > 2.002$). Artinya Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah adalah $F_{hitung} 150.198 > F_{tabel} 3,59$. Artinya secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Kesimpulannya yaitu secara parsial dan simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Selaras dengan tujuan otonomi dan *outcome*, penyusunan APBD bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian

suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan transfer. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja

pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah Kota Cimahi merupakan salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan adanya permasalahan dalam keuangan daerahnya yaitu Kinerja Keuangan yang dianggap kurang efisien. Fenomena tersebut dapat terlihat dengan menilai efisiensi atas realisasi belanja dari alokasi penganggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi terhadap suatu anggaran selama tahun 2014-2016.

Tabel 1.1 berikut ini menyajikan data yang terkait dengan fenomena tersebut.

Tabel 1.1
Rasio Efisiensi

Tahun	(Realisasi Belanja Daerah)	(Realisasi Pendapatan Daerah)	Rasio Efisiensi
2015	1.074.961.450.668,00	1.186.788.520.666,44	90,58%
2016	1.358.772.753.898,00	1.218.994.660.218,34	111,47%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi (Data Diolah)

Data pada tabel 1.1 dapat membuktikan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Cimahi dapat dikatakan belum efisien dari tahun ke tahun, karena pada tahun 2015 hasil perhitungan Rasio Efisiensinya sebesar 91%, hasil perhitungan rasio tersebut

menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Cimahi dapat dikatakan kurang efisien. Sedangkan, pada tahun 2016 hasil perhitungan Rasio Efisiensinya semakin menurun dan dapat dikatakan tidak efisien yaitu sebesar 111,47%.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perumusan masalah Asosiatif bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2014:7) "Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional". Didalam penelitian ini juga menggunakan perumusan masalah asosiatif dengan bentuk hubungan kausal, menurut Sugiyono (2014:32) "rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan

masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih". Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kota Cimahi.

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintahan Kota Cimahi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kota Cimahi. Dalam penelitian ini

rancangan analisis yang digunakan terdiri atas: Uji Normalitas Data, Korelasi *Product Moment*, Regresi Ganda, Koefisien Determinasi, Uji t, Uji f.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas Data

Adapun hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-*

Smirnov yang diolah dengan menggunakan SPSS versi 24 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.48604488
	Most Extreme Differences	Absolute
	Positive	.079
	Negative	-.047
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah dengan Program SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Dari hasil tersebut

dapat dijelaskan bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

2. Korelasi Product Moment

Tabel 4.5
Analisis Koefisien Korelasi

Correlations				
		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Kinerja Keuangan Pemerintah
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	.961**	.915**

	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	60	60	60
Dana Perimbangan	Pearson Correlation	.961**	1	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	60	60	60
Kinerja Keuangan Pemerintah	Pearson Correlation	.915**	.915**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah dengan Program SPSS Versi 24

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 24 tersebut maka nilai korelasi *Product Moment* antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,915. Angka 0,915 menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat (Bila $0,80 < r < 1,000$ artinya hubungan sangat kuat) antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).

Adapun nilai korelasi *Product Moment* antara variabel Dana Perimbangan (X_2) dan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0,915. Angka 0,915 menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat (Bila $0,80 < r < 1,000$ artinya hubungan sangat kuat) antara Dana Perimbangan (X_2) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah (Y).

3. Regresi Ganda

Tabel 3
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.543	3.571		13.314	.000
	Pendapatan Asli Daerah	9.907E-10	.000	.460	2.521	.015
	Dana Perimbangan	4.793E-10	.000	.473	2.593	.012

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah

Sumber: Data diolah dengan Program SPSS Versi 24

Berdasarkan perhitungan SPSS versi 24, maka dapat dilihat nilai konstanta (a) sebesar 42.377 dan nilai koefisien regresi (b) X_1 sebesar 9.907E-10, nilai koefisien regresi (b) X_2 sebesar 4.793E-10. Sehingga apabila dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier adalah $Y = 47.543 + 9.907E-10 +$

4.793E-10. Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Jika Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) nilainya adalah 0, maka nilai Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) adalah sebesar konstanta atau 47.543.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar $9.907E-10$ dengan taraf sig. 0.015, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 1, maka pertumbuhan

Kinerja Keuangan Pemerintah akan mengalami perubahan sebesar $9.907E-10$. Karena koefisien bernilai positif maka, jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan, kinerja keuangan pemerintah juga akan mengalami kenaikan.

4. Koefisien Determinasi

Tabel 4
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924 ^a	.854	.849	9.65103
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah				
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah				

Sumber: Data diolah dengan Program SPSS Versi 24

Berdasarkan perhitungan SPSS versi 24 diperoleh nilai R Square adalah 0,854 atau 85,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah yaitu sebesar 85,4% sedangkan sisanya 14,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji t

Tabel 5
Uji t Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.543	3.571		13.314	.000
	Pendapatan Asli Daerah	$9.907E-10$.000	.460	2.521	.015
	Dana Perimbangan	$4.793E-10$.000	.473	2.593	.012
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah						

Sumber: Data diolah dengan Program SPSS Versi 24

Berdasarkan hasil hitung menggunakan spss dapat diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah

sebesar 2.521 dengan derajat kebebasan sebesar 57 ($n-k-1$ yaitu $60-2-1$) dan pengujian dua pihak dengan taraf signifikansi 5% atau

0,05 maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.002 sehingga t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($2.521 > 2.002$) dengan demikian maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. Sedangkan t_{hitung} untuk variabel Dana Perimbangan adalah sebesar 2.593 dengan derajat kebebasan sebesar 57

6. Uji F

($n-k-1$ yaitu $60-2-1$) dan pengujian dua pihak dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.002 sehingga t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($2.593 > 2.002$) dengan demikian maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 6

Uji F Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31072.875	2	15536.438	166.803	.000 ^b
	Residual	5309.118	57	93.142		
	Total	36381.993	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah
 b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah dengan Program SPSS Versi 24

Berdasarkan perhitungan SPSS versi 24, maka didapat nilai F_{hitung} sebesar 150.198 dengan derajat kebebasan pembilang sama dengan nilai 2 dan derajat kebebasan penyebut 57 ($n-k-1$ yaitu $60-2-1$) dimana tingkat signifikan 5%, maka didapat F_{tabel} sebesar 3.16. Sehingga

F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($166.803 > 3.16$). Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

4. SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN

Berdasarkan identifikasi masalah, hipotesis dan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis secara parsial antara variabel X_1 dan Y menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat

pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

2. Hasil uji hipotesis secara parsial antara variabel X_2 dan Y menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

3. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya pendapatan asli daerah dan dana

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas, maka penulis mencoba mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Cimahi diharapkan dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerahnya agar mengurangi ketergantungan daerahnya terhadap Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota Cimahi perlu meningkatkan kembali pengelolaan keuangan daerahnya, khususnya untuk pendapatan daerah dan belanja daerahnya agar

perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kota cimahi.

tingkat efisien keuangan daerahnya dapat lebih ditingkatkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, diharapkan mengganti atau menambahkan variabel independen lain seperti Belanja Modal ataupun Belanja Daerah sehingga peneliti selanjutnya memungkinkan untuk menemukan hal yang baru dan berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, Mutia, Hasan Basri, M.Shabri. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. Universitas Syiah Kuala.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budianto, Stanly W Alexander. 2016. *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi.
- Halim dan Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: salemba Empat.
- Jauhar, Fauzan. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.
- Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi.
- Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Samudra Azis, Azhari. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.